



Pemerintah  
Kabupaten Banjar

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016

## **DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KAB.BANJAR**

Jalan A. Yani Km. 40 No. 4 Lantai 2 Gedung Berintan  
Martapura 70614  
Telp/Fax. (0511) 4721500

# Kata Pengantar

---

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kab. Banjar disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2016, serta Penetapan Kinerja Tahun 2016 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jbaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memuat informasi capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab.Banjar sehingga dapat diperoleh gambaran tentang hasil pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro yang telah dilakukan.

Diharapkan penyajian LKj IP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* di masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dengan tenaga dan pikirannya diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Martapura, Januari 2017  
KEPALA DINAS KOPERASI DAN  
USAHA MIKRO

**Ir. Achmad Suprpto**  
NIP. 19600512 198503 1 025

# Daftar Isi

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
BAB I PENDAHULUAN .....	3
I.1 Struktur Organisasi .....	4
I.2 Keuangan .....	5
I.3 Isu Strategis .....	5
I.4 Sistematika LKJ IP .....	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	7
II.1 Perencanaan Strategis .....	7
II.1.1 Visi dan Misi .....	8
II.1.2 Tujuan dan Sasaran.....	8
II.1.3 Strategi .....	9
II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 .....	12
II.3 Rencana Anggaran Tahun 2016.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	14
III.1. Capaian Kinerja Tahun 2016.....	15
III.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	23
III.3. Realisasi Anggaran.....	25
BAB IV PENUTUP .....	30

# BAB 1

## Pendahuluan

### **Bab 1 Berisi :**

1. *Struktur Organisasi*
2. *Fungsi dan Tugas*
3. *Keadaan Pegawai*
4. *Keuangan*
5. *Isu Strategis*
6. *Sistematika LKj IP*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab.Banjar Tahun 2016 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab.Banjar Tahun 2016 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab.Banjar
2. Mendorong Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab.Banjar di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab.Banjar untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab.Banjar di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **I.1 Struktur Organisasi**

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kab.Banjar merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:



## I.2 Keuangan

Pada tahun 2016 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kab.Banjar mempunyai anggaran dari sumber APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang dikelola Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Banjar sebagai berikut:

Tabel I.1 Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kab.Banjar

SUMBER ANGGARAN	JUMLAH (RP)
Belanja Tidak Langsung	3.156.087.906
Belanja Langsung	2.165.319.100
<b>Jumlah Total</b>	<b>5.321.407.006</b>

Sumber : Diskop dan UMKM kab.Banjar, Tahun 2016

## I.3 Isu Strategis

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Beberapa ISU STRATEGIS yang dihadapi dalam pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro antara lain :

- a. Koperasi dan UMK sebagai basis kekuatan ekonomi kerakyatan.
- b. Diberlakukannya MEA tahun 2015
- c. Peran Koperasi dan UMK dalam menghadapi pasar bebas
- d. Penerapan teknologi operasional / tatalaksana
- e. Kemudahan akses permodalan bagi Koperasi dan UMK dengan adanya kredit bersubsidi
- f. Pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan UMK (Pembinaan SDM, manajemen dan pembukuan)
- g. Penciptaan iklim usaha yang kondusif
- h. Legalitas usaha bagi pelaku Usaha Mikro Kecil melalui IUMK
- i. Masih banyak pengurus Koperasi yang belum
- j. Banyak Koperasi yang tidak aktif, tidak sehat dan mismanajemen
- k. Terbatasnya akses Koperasi dan UMK terhadap sumber daya produktif yaitu bahan baku, permodalan, teknologi, pemasaran dan kemitraan
- l. Rendahnya daya saing produk Koperasi dan UMK di pasar internasional.

## **I.4 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menyajikan pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Banjar selama tahun 2016. Dalam Laporan ini, pencapaian kinerja diukur dari pencapaian sasaran, yaitu dengan melakukan pengukuran atas indikator-indikator yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Banjar.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Banjar Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

### **Bab I : Pendahuluan**

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Banjar dan sekilas pengantar lainnya.

### **Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**

Memuat perencanaan kinerja dalam RPJMD, visi dan misi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Banjar tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Banjar serta program-program pembangunan dan Perjanjian Kinerja.

### **Bab III: Akuntabilitas Kinerja**

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan mengungkapkan dan menyajikan hasil pengukuran kinerja.

### **Bab IV : Penutup**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari akuntabilitas kinerja

## **LAMPIRAN**

# BAB 2

## Perencanaan & Perjanjian Kinerja

### **Bab 2 Berisi :**

1. *Perencanaan Strategis*
2. *Perjanjian Kinerja Tahun 2016*

### **II.1 Perencanaan Strategis**

Rencana strategis Instansi adalah dokumen perencanaan instansi jangka menengah (5 tahun) yang memuat Visi, Misi, tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Instansi, yang disusun menyesuaikan kepada sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) dan bersifat indikatif.



### II.1.1 Visi dan Misi

VISI :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera dan Barokah”

Penjelasan Visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Sejahtera adalah kesejahteraan rakyat yang mengandung keterpaduan dimensi material dan spiritual dalam wujud suasana kehidupanyang aman dan damai.
- Barokah adalah sesuatu yang dirasakan mempunyai nilai tambah, member manfaat dan kemaslahatan bagi orang banyak

Misi :

“ Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan agribisnis dan industry berwawasan lingkungan secara berkelanjutan.”

Penjelasan Misi tersebut adalah :

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan indikasi adanya pertumbuhan ekonomi khususnya PDRB sektor pertanian umum, sektor perikanan, mantapnya kondisi ketahanan pangan daerah yang disertai peningkatan pendapatan, produksi dan produktifitas, peningkatan nilai tambah, daya saing produk unggulan daerah, pengembangan industry hilir, agroindustri,kebijakan (regulasi) yang tepat dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam yang berkelanjutan serta prinsip tata kelola lingkungan yang baik

### II.1.2 Tujuan dan Sasaran

**Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Berdasarkan visi, misi dan kondisi strategis yang ada Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Banjar menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Menciptakan koperasi dan UMK yang maju
2. Menciptakan koperasi dan UMK yang tangguh dan berdaya saing
3. Pelayanan prima melalui penyediaan keperluan perkantoran, peningkatan SDM dan pengendalian pembangunan yang sistematis, Tujuan ketiga berkaitan dengan misi ketiga : Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan secara lancar, tertib dan teratur.

### II.1.3 Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi pemerintah Kabupaten Banjar, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke-4 (empat) dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

**Misi ke-4 (empat)** Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah.

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Sasaran Strategis Jangka Menengah**



## II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja pada tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja tahun 2016:

**Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terciptanya koperasi dan UMKM yang mampu memanaj usahanya sendiri, menguasai teknologi, mampu mengakses permodalan dan pemasaran	Prosentase koperasi aktif	62,5 %
		Jumlah anggota koperasi pada koperasi aktif	19.351 orang
		Serapan tenaga kerja di koperasi	619 orang
		Jumlah asset koperasi	Rp. 993.144.176.637
		Jumlah omzet koperasi	Rp. 36.146.820.994
		Jumlah koperasi yang mengakses permodalan	5 koperasi
		Serapan KUR dan program penguatan modal usaha	25 UMK
		Jumlah UMKM	100 UMKM
		Serapan tenaga kerja di UMK	300 orang
		Jumlah asset UMK	Rp. 1.500.000.000
		Jumlah omzet UMK	Rp. 3.000.000.000
		Jumlah UMK yang bisa membuat pembukuan usaha	150 UMK
		2	Terciptanya koperasi dan UMKM yang tangguh (kuat dalam menghadapi tantangan dari luar)
Legalitas usaha UMK	300 UMK		
SDM yang mengikuti pelatihan	195 orang		
Jumlah koperasi simpan pinjam yang sehat	10 koperasi		

		usaha	
3	Terciptanya koperasi dan UMKM yang berdaya saing (mampu bersaing dengan produk luar dan mampu memanfaatkan peluang pasar)	Persentase skala usaha mikro menjadi usaha kecil	0.25
		Jumlah KUMKM yang melakukan promosi dan pameran ke luar daerah	10 KUMKM
		Jumlah UMKM yang bermitra usaha	5 UMKM
4	Kelancaran pelayanan publik, dengan penyediaan sarana dan prasarana perkantoran dan sarana penunjang lainnya	Pelayanan administrasi perkantoran berupa : penyediaan aneka jasa	3 kegiatan
		Pelayanan administrasi perkantoran berupa : penyediaan alat, barang, bahan dan makanan keperluan perkantoran	6 kegiatan
		Lancarnya koordinasi, pembinaan berupa rapat, perjalanan dinas	1 Tahun
		Pengadaan kendaraan dinas / operasional	2 buah
		Terpeliharanya sarana dan prasarana pelayanan perkantoran	7 buah
5	Peningkatan kedisiplinan, kualitas SDM aparatur dan kesejahteraan aparatur	Jumlah karyawan yang disiplin dalam berpakaian dinas dan kelengkapannya terhadap total karyawan	100%
		Jumlah karyawan yang tingkat absensi kehadirannya diatas 90 % dalam setahun terhadap total karyawan	100%
		Jumlah PNS yang tidak terkena hukuman pelanggaran disiplin aparatur dan atau pelanggaran hukum terhadap total PNS	100%
		Aparatur yang mengikuti bintek, seminar, lokakarya, studi banding dll, terhadap total karyawan	20 orang
		Aparatur yang mengikuti diklat formal, ( struktural, fungsional, teknis )	2 orang
6	Pengendalian pembangunan daerah melalui perencanaan koordinatif, pengelolaan keuangan profesional dan monev pelaksanaan pembangunan yang sistematis	Tersusunnya dokumen perencanaan tepat waktu	10 dokumen
		Tersusunnya dokumen keuangan tepat waktu	3 dokumen

### II.3 Rencana Anggaran Tahun 2016

Pada Tahun Anggaran 2016 SKPD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 5.358.304.645,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2016 menjadi Rp. 5.321.407.006,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 3.156.087.906,- dan Belanja Langsung Rp. 2.165.319.100,-.

# BAB 3

## Akuntabilitas Kinerja

### **Bab 3 Berisi :**

1. *Capaian Kinerja Tahun 2016*
2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis*
3. *Akuntabilitas Anggaran*

### **A. Capaian Kinerja**

#### **III.1. Capaian Kinerja Tahun 2016**

SKPD Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Banjar telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Banjar tahun 2016 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah

❖ Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Banjar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Banjar beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel III.2 Pengukuran Kinerja Tahun 2016

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2015	Tahun 2016			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2016 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase koperasi aktif	61,47 %	62,50 %	62,87 %	100,59	67,50 %	93,14
2	Jumlah anggota koperasi pada koperasi aktif	19,368 orang	19.393 orang	26.847 orang	138,44	19.518 orang	137,54
3	Jumlah omzet koperasi	Rp. 46.621 (juta)	Rp. 46.821 (juta)	Rp. 64.184 (juta)	137,09	Rp. 47.821 (juta)	134,22
4	Jumlah koperasi yang mengakses permodalan	0 unit	5 unit	4 unit	80	30 unit	13,33
5	Serapan KUR dan Program penguatan modal usaha	Rp. 20.900 (juta)	Rp. 25.000 (juta)	Rp. 118.600 (juta)	474,4	Rp. 200.900 (juta)	59,03
6	Jumlah Usaha Mikro	31,150 orang/badan usaha	35.150 orang/badan usaha	31.150 orang/badan usaha	88,62	55.151 orang/badan usaha	56,48
7	Jumlah Usaha Mikro yang bisa membuat pembukuan usaha	0 orang/badan usaha	150 orang/badan usaha	140 orang/badan usaha	93,33	900 orang/badan usaha	15,55
8	Legalitas usaha koperasi (jumlah koperasi yang memiliki izin usaha)	0 unit	5 unit	14 unit	280	30 unit	46,67
9	Legalitas usaha Usaha Mikro	748 orang	300 orang	1.555 orang	518	2.248 orang	69,17
10	SDM yang mengikuti pelatihan	263 orang	0 orang	140 orang	140	1.163 orang	12,03
11	Persentase koperasi simpan pinjam yang sehat usaha	58 unit	5 unit	3 unit	60	88 unit	0,034
12	Persentase skala usaha mikro menjadi usaha kecil	0 %	0,25 %	0,20 %	80	1,50 %	13,33
13	Jumlah KUM yang melakukan promosi dan promosi ke luar daerah	8 orang/badan usaha	8 orang / badan usaha	8 orang / badan usaha	100	68 orang/badan us	11,76
14	Jumlah Usaha Mikro yang bermitra usaha	121 orang	5 orang	5 orang	100	151 orang	3,31



15	Pelayanan administrasi perkantoran berupa : penyediaan aneka jasa	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100	3 kegiatan	100
16	Pelayanan administrasi perkantoran berupa : penyediaan alat, barang, bahan dan makanan keperluan kantor	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	100	6 kegiatan	100
17	Lancarnya koordinasi pembinaan berupa rapat, perjalanan dinas	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	100
18	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	7 buah	2 buah	0	0	12 buah	0
19	Terpeliharanya sarana dan prasarana pelayanan perkantoran	7 buah	7 buah	7 buah	100	17 buah	100
20	Jumlah karyawan yang disiplin dalam berpakaian dinas dan kelengkapannya terhadap total karyawan	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100
21	Jumlah karyawan yang tingkat absensi kehadirannya diatas 90 % dalam setahun terhadap total karyawan	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100
22	Jumlah PNS yang tidak terkena hukuman pelanggaran disiplin aparatur dan atau pelanggaran hokum terhadap total PNS	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100
23	Aparatur yang mengikuti bintek, seminar, lokakarya, studi banding dll terhada total karyawan	7 orang	20 orang	20 orang	100	120 orang	16,67
24	Aparatur yang mengikuti diklat formal ( struktural, fungsional, teknis )	1 orang	2 orang	2 orang	100	12 orang	16,67
25	Tersusunnya dokumen perencanaan tepat waktu	10 laporan	10 laporan	10 laporan	100	10 laporan	100
26	Tersusunnya dokumen keuangan tepat waktu	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100	3 laporan	100

Tabel III.3 Pengukuran Kinerja Tahun 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2015	Target	Realisasi	% Realisasi	Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2016 terhadap 2021 (%)
Terciptanya koperasi dan UMKM yang mampu memanaj usahanya sendiri, menguasai teknologi, mampu mengakses permodalan dan pemasaran	Persentase koperasi aktif	61.47 %	62,50 %	62,87 %	100,59	67.50 %	93,14
	Jumlah anggota koperasi pada koperasi aktif	19,368 orang	19.393 orang	26.847 orang	138,44	19.518 orang	137,54
	Jumlah omzet koperasi	Rp. 46.621 (juta)	Rp. 46.821 (juta)	Rp. 64.184 (juta)	137.09	Rp. 47.821 (juta)	134.22
	Jumlah koperasi yang mengakses permodalan	0 unit	5 unit	4 unit	80	30 unit	13,33
	Serapan KUR dan Program penguatan modal usaha	Rp. 20.900 (juta)	Rp. 25.000 (juta)	Rp. 118.600 (juta)	474,4	Rp. 200.900 (juta)	59,03
	Jumlah Usaha Mikro	31,150 orang/badan usaha	35.150 orang/badan usaha	31.150 orang/badan usaha	88.62	55.151 orang/badan usaha	56.48
	Jumlah Usaha Mikro yang bisa membuat pembukuan usaha	0 orang/badan usaha	150 orang/badan usaha	140 orang/badan usaha	93,33	900 orang/badan usaha	15,55
Terciptanya koperasi dan UMKM yang tangguh ( kuat dalam menghadapi tantangan dari luar )	Legalitas usaha koperasi (jumlah koperasi yang memiliki izin usaha)	0 unit	5 unit	14 unit	280	30 unit	46,67
	Legalitas usaha Usaha Mikro	748 orang	300 orang	1.555 orang	518	2.248 orang	69,17
	SDM yang mengikuti pelatihan	263 orang	0 orang	140 orang	140	1.163 orang	12,03
	Persentase koperasi simpan pinjam yang sehat usaha	58 unit	5 unit	3 unit	60	88 unit	0.034

Terciptanya koperasi dan UMKM yang berdaya saing ( mampu bersaing dengan produk luar dan mampu memanfaatkan peluang pasar )	Persentase skala usaha mikro menjadi usaha kecil	0 %	0,25 %	0,20 %	80	1,50 %	13,33
	Jumlah KUM yang melakukan promosi dan promosi ke luar daerah	8 orang/badan usaha	8 orang / badan usaha	8 orang / badan usaha	100	68 orang/badan us	11,76
	Jumlah Usaha Mikro yang bermitra usaha	121 orang	5 orang	5 orang	100	151 orang	3,31
Kelancaran pelayanan publik, dengan menyediakan sarana dan prasarana perkantoran dan sarana penunjang lainnya	Pelayanan administrasi perkantoran berupa : penyediaan aneka jasa	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100	3 kegiatan	100
	Pelayanan administrasi perkantoran berupa : penyediaan alat, barang, bahan dan makanan keperluan kantor	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	100	6 kegiatan	100
	Lancarnya koordinasi pembinaan berupa rapat, perjalanan dinas	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	100
	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	7 buah	2 buah	0	0	12 buah	0
	Terpeliharanya sarana dan prasarana pelayanan perkantoran	7 buah	7 buah	7 buah	100	17 buah	100
Peningkatan kedisiplinan, kualitas SDM aparatur dan kesejahteraan aparatur	Jumlah karyawan yang disiplin dalam berpakaian dinas dan kelengkapannya terhadap total karyawan	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100

	Jumlah karyawan yang tingkat absensi kehadirannya diatas 90 % dalam setahun terhadap total karyawan	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100
	Jumlah PNS yang tidak terkena hukuman pelanggaran disiplin aparatur dan atau pelanggaran hokum terhadap total PNS	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100
	Aparatur yang mengikuti bintek, seminar, lokakarya, studi banding dll terhadap total karyawan	7 orang	20 orang	20 orang	100	120 orang	16,67
	Aparatur yang mengikuti diklat formal ( struktural, fungsional, teknis )	1 orang	2 orang	2 orang	100	12 orang	16,67
Pengendalian pembangunan daerah melalui perencanaan koordinatif, pengelolaan keuangan profesional dan monev pelaksanaan pembangunan yang sitematis	Tersusunnya dokumen perencanaan tepat waktu	10 laporan	10 laporan	10 laporan	100	10 laporan	100
	Tersusunnya dokumen keuangan tepat waktu	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100	3 laporan	100

Tabel III.4 Pengukuran Kinerja Tahun 2016

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2015	Tahun 2016			Kriteria
			Target	Realisasi	% Realisasi	
1	Persentase koperasi aktif	61.47 %	62,50 %	62,87 %	100,59	Sangat baik
2	Jumlah anggota koperasi pada koperasi aktif	19,368 orang	19.393 orang	26.847 orang	138,44	Sangat baik
3	Jumlah omzet koperasi	Rp. 46.621 (juta)	Rp. 46.821 (juta)	Rp. 64.184 (juta)	137.09	Sangat baik
4	Jumlah koperasi yang mengakses permodalan	0 unit	5 unit	4 unit	80	Tinggi
5	Serapan KUR dan Program penguatan modal usaha	Rp. 20.900 (juta)	Rp. 25.000 (juta)	Rp. 118.600 ( juta )	474,4	Sangat baik
6	Jumlah Usaha Mikro	31,150 orang/badan usaha	35.150 orang/badan usaha	31.150 orang/badan usaha	88.62	Tinggi
7	Jumlah Usaha Mikro yang bisa membuat pembukuan usaha	0 orang/badan usaha	150 orang/badan usaha	140 orang/badan usaha	93,33	Sangat baik
8	Legalitas usaha koperasi (jumlah koperasi yang memiliki izin usaha)	0 unit	5 unit	14 unit	280	Sangat baik
9	Legalitas usaha Usaha Mikro	748 orang	300 orang	1.555 orang	518	Sangat baik
10	SDM yang mengikuti pelatihan	263 orang	0 orang	140 orang	140	Sangat baik
11	Persentase koperasi simpan pinjam yang sehat usaha	58 unit	5 unit	3 unit	60	Rendah
12	Persentase skala usaha mikro menjadi usaha kecil	0 %	0,25 %	0,20 %	80	Tinggi
13	Jumlah KUM yang melakukan promosi dan promosi ke luar daerah	8 orang/badan usaha	8 orang / badan usaha	8 orang / badan usaha	100	Sangat baik
14	Jumlah Usaha Mikro yang bermitra usaha	121 orang	5 orang	5 orang	100	Sangat baik
15	Pelayanan administrasi perkantoran berupa : penyediaan aneka jasa	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100	Sangat baik

16	Pelayanan administrasi perkantoran berupa : penyediaan alat, barang, bahan dan makanan keperluan kantor	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	100	Sangat baik
17	Lancarnya koordinasi pembinaan berupa rapat, perjalanan dinas	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100	Sangat baik
18	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	7 buah	2 buah	0	0	Sangat rendah
19	Terpeliharanya sarana dan prasarana pelayanan perkantoran	7 buah	7 buah	7 buah	100	Sangat baik
20	Jumlah karyawan yang disiplin dalam berpakaian dinas dan kelengkapannya terhadap total karyawan	100 %	100 %	100 %	100	Sangat baik
21	Jumlah karyawan yang tingkat absensi kehadirannya diatas 90 % dalam setahun terhadap total karyawan	100 %	100 %	100 %	100	Sangat baik
22	Jumlah PNS yang tidak terkena hukuman pelanggaran disiplin aparatur dan atau pelanggaran hokum terhadap total PNS	100 %	100 %	100 %	100	Sangat baik
23	Aparatur yang mengikuti bintek, seminar, lokakarya, studi banding dll terhada total karyawan	7 orang	20 orang	20 orang	100	Sangat baik
24	Aparatur yang mengikuti diklat formal ( struktural, fungsional, teknis )	1 orang	2 orang	2 orang	100	Sangat baik
25	Tersusunnya dokumen perencanaan tepat waktu	10 laporan	10 laporan	10 laporan	100	Sangat baik
26	Tersusunnya dokumen keuangan tepat waktu	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100	Sangat baik
<b>CAPAIAN</b>					<b>134,25</b>	<b>Sangat baik</b>

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kab.Banjar, Tahun 2016

Dari tabel di atas, terdapat 26 indikator yang terbagi ke dalam 6 sasaran strategis. Pada tahun 2016, 20 indikator telah memenuhi target yang ditetapkan . Sementara itu, sebanyak 6 indikator atau sebesar 23,10 % belum memenuhi target. Tidak tercapainya target disebabkan oleh berbagai faktor kendala. Capaian yang tertinggi pada indikator SDM yang mengikuti pelatihan dengan persentase 518 %, sementara indikator yang mengalami capaian

yang rendah adalah jumlah koperasi yang mengakses permodalan.

### **III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**

Dalam sub ini akan disajikan pencapaian sasaran program Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Banjar yang dicerminkan dalam indikator program. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator program menurut sasaran program diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase Koperasi Aktif

Capaian indikator persentase koperasi aktif tahun 2016 yaitu 100,59 %. Peningkatan ini karena adanya pembenahan koperasi tidak aktif menjadi aktif, penyuluhan perkoperasian, pembinaan terhadap gerakan koperais, pendampingan RAT untuk gerakan koperasi, revitalisasi kelembagaan dan usaha koperasi, adanya pembaruan data (mpendataan ulang) dan adanya pendidikan pelatihan (diklat) perkoperasian bagi anggota koperasi banyak yang aktif dan membuat persentase koperasi menjadi meningkat.

2. Jumlah anggota koperasi pada koperasi aktif

Capaian indikator jumlah anggota koperasi pada koperasi aktif yaitu 138,44 %. Peningkatan ini dikarenakan adanya koperasi yang semula tidak aktif menjadi aktif sehingga jumlah anggota koperasi pada koperasi aktif juga meningkat.

3. Jumlah omzet koperasi

Capaian indikator jumlah omzet koperasi yaitu 137,09 %. Peningkatan ini dikarenakan tersedianya peluang usaha di masing-masing koperasi dan adanya penambahan modal sendiri seiring bertambahnya jumlah anggota koperasi sehingga jumlah omzet koperasi juga meningkat.

4. Legalitas usaha koperasi (jumlah koperasi yang memiliki izin usaha)

Capaian indikator Legalitas usaha koperasi (jumlah koperasi yang memiliki izin usaha) yaitu 280 %. Dengan diadakannya sosialisasi izin operasional atau izin usaha simpan pinjam sesuai Permen no 15 dan 16 tahun 2015 bisa membuat para pengurus menjadi sadar akan pentingnya izin usahanya sehingga para pengurus koperasi banyak yang mendaftarkan izin usaha mereka dan telah memiliki izin.

5. Serapan KUR dan program penguatan modal usaha

Capaian indikator Serapan KUR dan program penguatan modal usaha yaitu 474,4 %. Ada 4 (empat) Bank penyalur dana KUR yaitu Bank Kalsel, BRI, BNI, dan Mandiri dengan menawarkan suku bunga yang rendah. Dengan adanya sosialisasi yang begitu masif kepada pelaku usaha sehingga para pelaku usaha mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat. Dengan suku bunga yang ditawarkan sangat rendah sehingga para pelaku usaha banyak yang memanfaatkan dana KUR sebagai tambahan modal untuk

menjalankan usahanya.

Tabel III.5 Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja yang $\geq$ 100 %
Terciptanya koperasi dan UMKM yang mampu memanaj usahanya sendiri, menguasai teknologi, mampu mengakses permodalan dan pemasaran	Persentase koperasi aktif	100,59
	Jumlah anggota koperasi pada koperasi aktif	138,44
	Jumlah omzet koperasi	137.09
	Serapan KUR dan Program penguatan modal usaha	474,4
Terciptanya koperasi dan UMKM yang tangguh ( kuat dalam menghadapi tantangan dari luar )	Legalitas usaha koperasi (jumlah koperasi yang memiliki izin usaha)	280
	Legalitas usaha Usaha Mikro	518
	SDM yang mengikuti pelatihan	140

## B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.



Tabel III.6 Realisasi Anggaran tahun 2016

Sasaran	Indikator sasaran	Kinerja			Nama Program	Keuangan		
		Target	Realisasi	% Realisasi		Pagu	Realisasi	% Realisasi
					Program pelayanan administrasi perkantoran			
Terciptanya koperasi dan UMKM yang mampu memanej usahanya sendiri, menguasai teknologi, mampu mengakses permodalan dan pemasaran	<i>Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	<i>12 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>100</i>		23.400.000	22.084.275	94,38
	<i>Tersedianya jasa administrasi keuangan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>100</i>		3.570.000	3.570.000	100
	<i>Tersedianya tenaga kebersihan, alat dan bahan pembersih</i>	<i>12 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>100</i>		12.750.000	12.750.000	100
	<i>Tersedianya ATK</i>	<i>12 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>100</i>		17.000.000	16.900.000	99,41
	<i>Tersedianya barang cetak dan penggandaan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>100</i>		12.000.000	12.000.000	100
	<i>Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	<i>4 triwulan</i>	<i>4 triwulan</i>	<i>100</i>		3.640.000	3.640.000	100
	<i>Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor</i>	<i>2 buah</i>	<i>2 buah</i>	<i>100</i>		16.900.000	16.900.000	100
Terciptanya koperasi dan UMKM yang tangguh ( kuat dalam menghadapi tantangan dari luar )	<i>Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan makanan dan minuman rapat</i>	<i>12 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>100</i>		207.900.000	207.830.500	99,97
	<i>Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam ke luar daerah</i>	<i>12 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>100</i>		145.000.000	144.916.200	99,94
	<i>Tersedianya tenaga jaga malam, satpam, sopir</i>	<i>12 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>100</i>		173.500.000	168.900.000	97,35
Terciptanya koperasi dan UMKM yang berdaya saing ( mampu bersaing					Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			

dengan produk luar dan mampu memanfaatkan peluang pasar )	<i>Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	12 bulan	12 bulan	100		109.750.000	109.275.000	99,57
	<i>Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan peralatan gedung kantor</i>	1 tahun	1 tahun	100		21.000.000	20.975.000	99,88
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
	<i>Terlaksananya pengadaan mesin / kartu absensi</i>	1 paket	1 paket	100	Pengadaan Mesin / kartu absensi	15.000.000	15.000.000	100
Kelancaran pelayanan publik, dengan menyediakan sarana dan prasarana perkantoran dan sarana penunjang lainnya					Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			
	<i>Terlaksananya bimbingan teknis</i>	1 tahun	1 tahun	100		50.000.000	50.000.000	100
					Program penciptaan iklim usaha usaha kecil menengah yang kondusif			
	<i>Terlaksananya pendataan UMKM</i>	3 kecamatan	3 kecamatan	100		10.000.000	9.980.000	99,80
	<i>Terlaksananya sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil ( permodalan )</i>	12 kali	12 kali	100		178.755.000	178.660.500	99,95
Peningkatan kedisiplinan, kualitas SDM aparatur dan kesejahteraan aparatur	<i>Terlaksananya pendampingan usaha bagi UMKM</i>	150 UMKM	150 UMKM	100		79.980.000	79.880.000	99,87
					Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah			
	<i>Terlaksannaya fasilitasi kemitraan UMKM</i>	3 kali	3 kali	100		51.050.000	50.805.240	99,52

	<i>Terlaksananya pelatihan kewirausahaan</i>	<i>3 kali</i>	<i>3 kali</i>	<i>100</i>		<i>188.230.000</i>	<i>183.355.000</i>	<i>97,41</i>
Pengendalian pembangunan daerah melalui perencanaan koordinatif, pengelolaan keuangan profesional dan monev pelaksanaan pembangunan yang sistematis	<i>Terlaksananya pelatihan manajemen pengelolaan koperasi</i>	<i>2 kali</i>	<i>2 kali</i>	<i>100</i>		<i>134.050.000</i>	<i>129.470.000</i>	<i>96,58</i>
	<i>Terlaksananya sosialisasi HAKI</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah			
	<i>Tercetaknya leaflet informasi permodalan</i>	<i>8.500 lembar</i>	<i>8.500 lembar</i>	<i>100</i>		<i>29.500.000</i>	<i>29.475.500</i>	<i>99,92</i>
	<i>Terlaksananya jasa konsultasi pengawasan</i>	<i>2 keg</i>	<i>3 keg</i>	<i>150</i>		<i>127.619.100</i>	<i>125.269.725</i>	<i>98,16</i>
	<i>Terlaksannaya pameran / expo</i>	<i>3 kali</i>	<i>3 kali</i>	<i>100</i>		<i>269.588.200</i>	<i>260.873.800</i>	<i>96,77</i>
					Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi			
	<i>Terlaksananya kebijakan dan program pembangunan koerasi</i>	<i>100 koperasi</i>	<i>100 koperasi</i>	<i>100</i>		<i>123.179.300</i>	<i>122.948.600</i>	<i>99,81</i>
	<i>Terlaksananya sosialisasi prinsip – prinsip pemahaman perkoperasian</i>	<i>9 kali</i>	<i>6 kali</i>	<i>66,67</i>		<i>112.387.000</i>	<i>91.096.800</i>	<i>81,05</i>
	<i>Terlaksananya pemberian penghargaan kepada koperasi berprestasi</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Tersedianya data koperasi yang akurat</i>	<i>4 dokumen data keragaman koperasi</i>	<i>4 dokumen data keragaman koperasi</i>	<i>100</i>		<i>8.470.500</i>	<i>8.370.100</i>	<i>98,81</i>

	<i>Terlaksannaya pembinaan dan evaluasi terhadap koperasi</i>	<i>60 koperasi</i>	<i>50 koperasi</i>	<i>83,33</i>		<i>24.100.000</i>	<i>22.520.000</i>	<i>93,44</i>
	<i>Terlaksananya promosi produk koperasi</i>	<i>1 kali</i>	<i>1 kali</i>	<i>100</i>		<i>17.000.000</i>	<i>17.000.000</i>	<i>100</i>
	<b>CAPAIAN</b>			<b>93,33</b>		<b>2.165.319.100</b>	<b>2.114.446.240</b>	<b>91,72</b>

## BAB 4

### Penutup

#### **Bab 4 Berisi :**

1. Kesimpulan
2. Saran

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Banjar pada Tahun Anggaran 2016 merupakan tahun ke-1 dari Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2016-2021. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tahun 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis 6 (enam) sasaran, terdapat 2 (dua) indikator kinerja sebagai tolak ukur, pada Tahun 2016, 1 (satu) indikator kinerja telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 100,59 % persentase realisasinya, sementara itu 1 (satu) indikator kinerja belum memenuhi target, tidak tercapainya target disebabkan oleh berbagai kendala.
2. Keberhasilan capaian kinerja sasaran dicerminkan dari capaian indikator kinerja sasaran ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana.

Langkah langkah yang perlu diambil untuk diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.

2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di Instansi Pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian penetapan/perjanjian kinerja (PK).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2016 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.



# LAMPIRAN



